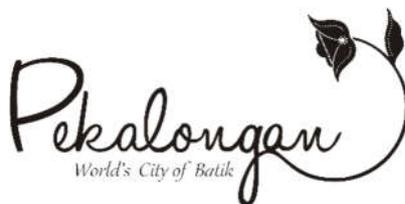




**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 34A TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2016 – 2021**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 - 429451**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rakhmat dan hidayahNya, Badan Keuangan Daerah telah menyusun Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34a Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 (Perubahan Kedua Rentra). Penyusunan Perubahan Kedua Rentra merupakan tidak lanjut dari telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Kedua Renstra ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam mensukseskan pembangunan dalam bidang pengelolaan keuangan.

Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Renstra ini dapat tersusun dengan baik.

Pekalongan, November 2018

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan



Drs. SUCIONO

Pembina Tk. I

NIP. 19610316 199303 1 004

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penyusunan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA PEKALONGAN	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD	12
2.2 Sumber Daya BKD	27
2.2.1.Kondisi Kepegawaian	27
2.2.2.Kondisi Prasarana dan Sarana	30
2.3 Kinerja Pelayanan BKD	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan BKD.....	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD	40
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota.....	41
3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah	42
3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN.....	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
BAB VIII PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan merupakan sebuah organisasi Perangkat Daerah yang juga mempunyai fungsi sebagai Perangkat Daerah serta bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan utamanya yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, diarahkan untuk mewujudkan terciptanya sebuah tata pengelolaan keuangan yang akuntabel serta mendukung sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat serta dalam rangka mendukung Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Pekalongan yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masih menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun

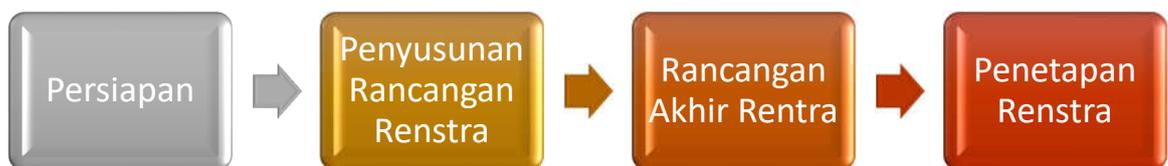
2016-2021, maka Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan perlu menyusun Perubahan Kedua Rencana Strategi (Renstra) BKD Kota Pekalongan yang merupakan bagian dari Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34a Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021. Perubahan Kedua Rencana Strategi (Renstra) BKD Kota Pekalongan disusun dengan kerangka logis mengarah pada empat hal utama yang menjadi prinsip perubahan, yaitu :

1. Perubahan sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah BKD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
2. Perubahan atas sistematika sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
3. Perubahan substansial pada Bab IV yang telah menghapus pencantuman Visi dan Misi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
4. Menjaga konsistensi dengan RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategi (Renstra) BKD Kota Pekalongan yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34a Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada RPJMD dengan

memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional. Perubahan Kedua Renstra BKD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BKD sebagai penyusun kebijakan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan BKD selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala BKD dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renstra BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dilakukan melalui tahapan :



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis BKD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neoptisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
 37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 dimaksudkan untuk :

- a. Merupakan tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

3. Merupakan dasar hukum penyusunan RENJA BKD Tahun 2019 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan keuangan dilaksanakan oleh BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2016-2021
4. Merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan BKD Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Walikota ke dalam tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra BKD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan BKD Kota Pekalongan

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan BKD Kota Pekalongan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur

organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan; telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi BKD Kota Pekalongan.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun mendatang.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Babinimenguraikan Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKD dalam lima tahun ke depan sebagai wujud komitmen dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA PEKALONGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD

BKD Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. Tugas pokok BKD adalah membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta mempunyai fungsi:

1. perumusan rencana kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan serta aset daerah;
2. perumusan rancangan APBD dan APBD perubahan;
3. fungsi BUD (Bendaharawan Umum Daerah);
4. penyelenggaraan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. pengkoordinasian peningkatan dan fasilitasi Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah;
6. pengkoordinasian pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. pengarahan pemberian bimbingan teknis mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. perencanaan penyuluhan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi (WR) dan pembinaan teknis yang berhubungan dengan pendapatan daerah;
9. pengkoordinasian pendaftaran dan pendataan WP / WR serta penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
10. pengkoordinasian penagihan pajak dan retribusi daerah;
11. pengkoordinasi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah
12. pengelolaan belanja daerah dan belanja tidak terduga;
13. pengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;

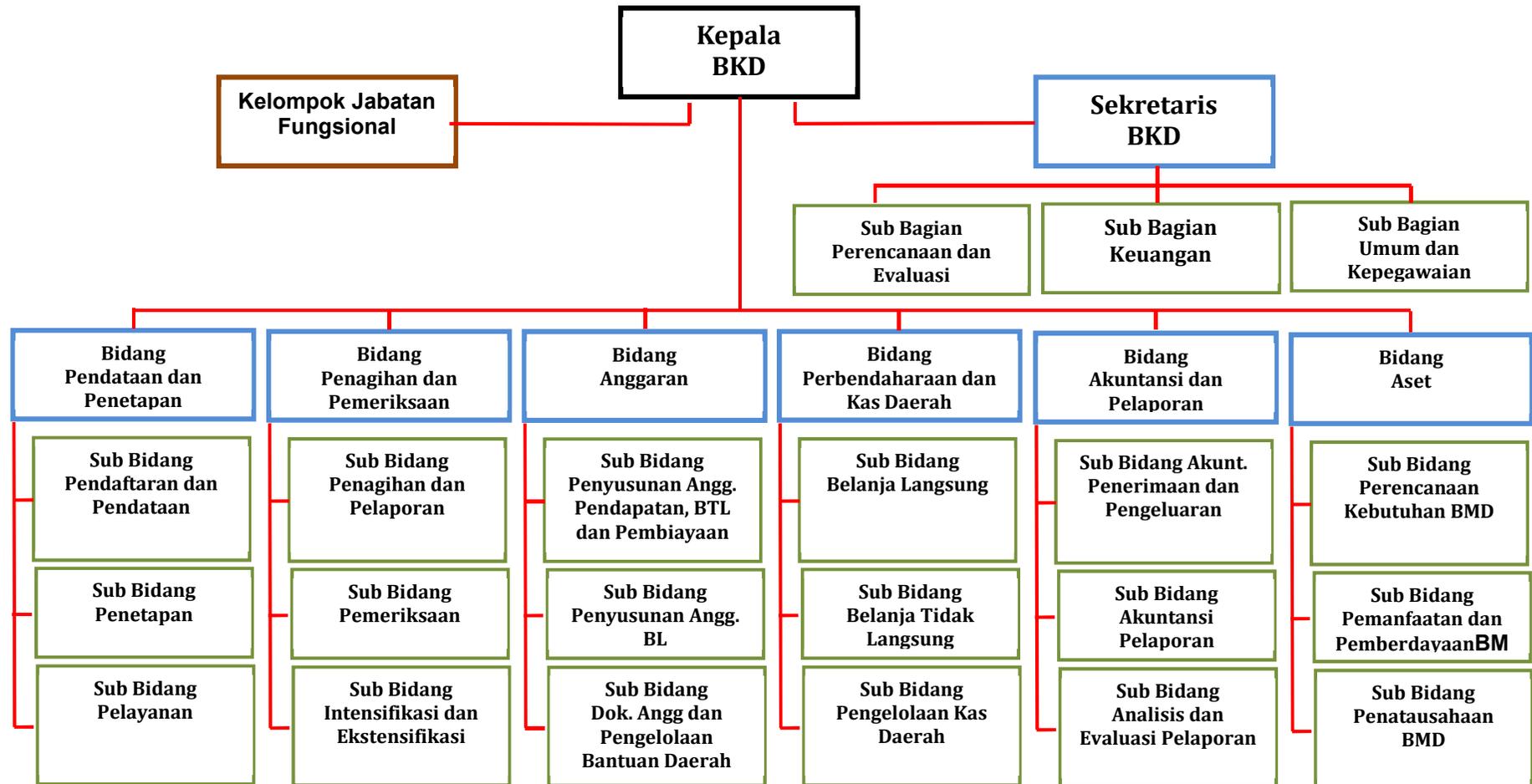
14. perumusan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan / Pedesaan;
15. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
16. pengkoordinasian penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota mengenai pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah;
17. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
18. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

Struktur organisasi BKD Kota Pekalongan terdiri dari Susunan Organisasi BKD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari: Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub bagian Keuangan, dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari: Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan, Sub bidang Penetapan, dan Sub bidang Pelayanan.
4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri dari Sub bidang Penagihan dan Pelaporan, Sub bidang Pemeriksaan, dan Sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
5. Bidang Anggaran, terdiri dari Sub bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, Sub bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung, dan Sub bidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari Sub bidang Belanja Langsung, Sub bidang Belanja Tidak Langsung, Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari Sub bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran, Sub bidang Akuntansi Pelaporan, dan Sub bidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan.

8. Bidang Aset, terdiri dariSub bidang Perencanaan Kebutuhan BMD, Sub bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD, danSub bidang Penatausahaan BMD.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi BKD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi BKD Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi BKD memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas

Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelayanan administratif umum, Kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan BKD.

b. Fungsi

- 1) pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam urusan kesekretariatan;
- 2) pengkoordinasi antar bidang dan kesekretariatan BKD;
- 3) pengkoordinasi teknis administrasi perkantoran BKD;
- 4) pengkoordinasi pelaksanaan urusan kerumahtanggaan BKD;
- 5) pengkoordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan BKD;
- 6) pengkoordinasi perencanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
- 7) penyusun Renja, Renstra, RKA dan pelaporan BKD;
- 8) pembina organisasi dan ketatalaksanaan BKD;
- 9) pengelola administrasi kepegawaian BKD;
- 10) pengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 11) pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas tugas membantu Sekretaris urusan perencanaan dan evaluasi kegiatan BKD. Fungsinya adalah penyusun Renstra, Renja dan RKA BKD;perencana, pelapor dan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah;perencana pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BKD;pelaksana renja bidang tugasnya;pelaksana

dan pengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris urusan administrasi keuangan. Fungsinya adalah penyusun dan pengkoordinasi laporan keuangan BKD; pemverifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; pelaksana fungsi akuntansi BKD; pelaksana renja bidang tugasnya; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris urusan administrasi umum dan kepegawaian. Fungsinya adalah pelaksana administrasi umum dan kepegawaian BKD; perencana organisasi dan ketetalaksanaan BKD; pelaksana urusan kerumahtanggaan BKD; pelaksana renja bidang tugasnya; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pendataan dan Penetapan

a. Tugas

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.

b. Fungsi:

- 1) pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- 2) pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Pendataan dan Penetapan;

- 3) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Pendataan dan Penetapan;
- 4) pengkoordinasi pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah;
- 5) pengkoordinasi penetapan pajak dan retribusi daerah;
- 6) pengkoordinasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- 7) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 8) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu : Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, Subbidang Penetapan dan Subbidang Pelayanan.

- 1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam bidang pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; pelaksana pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi; pelaksana pendataan pajak dan retribusi daerah; pelaksana Pengolahan database potensi pajak dan retribusi daerah; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Penetapan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam penetapan pajak dan retribusi daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penetapan; pelaksana penghitungan pajak dan retribusi daerah; pelaksana penetapan pajak dan retribusi daerah; pemproses pengajuan keberatan, keringanan dan banding pajak dan retribusi daerah; pelaksana dan pengevaluasian Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Subbidang Pelayanan, mempunyai tugas sebagai :perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pelayanan;pelaksana pelayanan pajak dan retribusi daerah;penyusun draf surat keputusan atas pelayanan pajak dan retribusi daerah;pendokumentasian berkas pelayanan dan surat keputusan atas pelayanan;pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

a. Tugas

Mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam bidang Penagihan dan Pelaporan, Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah dan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

b. Fungsi

- 1) pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- 2) pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- 3) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- 4) pengkoordinasi penetapan target pajak dan retribusi daerah;
- 5) pengkoordinasi penagihan pajak dan retribusi daerah;
- 6) pengkoordinasi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- 7) pengkoordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- 8) pelaksana Pengelolaan Penagihan dan Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;

- 9) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 10) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai 3(tiga) Subbidang yaitu Subbidang Penagihan dan Pelaporan, Subbidang Intesifikasi dan Ekstensifikas dan Subbidang Pemeriksaan.

- 1) Subbidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam bidang Penagihan dan Pelaporan pajak dan retribusi daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penagihan dan Pelaporan;pelaksana penagihan pajak dan retribusi daerah;pelaksana pelaporan realisasi penerimaan dan piutang pajak dan retribusi daerah;pemproses pengajuan bebas denda/sanksi administrasi;pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; danpelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam bidang pemeriksaan pajak dan retribusi daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pemeriksaan;pelaksana verifikasi pajak daerah;pelaksana pemeriksaan pajak dan retibusi daerah;pelaksana Pengelolaan Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; danpelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan

Pemeriksaan dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi; penyusun draf penetapan target pajak dan retribusi daerah; penyusun draf Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait Pajak dan Retribusi Daerah; pelaksana bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah; pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi lainnya; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Anggaran

a. Tugas

Membantu kepala Badan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Fungsi:

- 1) pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Anggaran;
- 2) pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Anggaran;
- 3) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Anggaran;
- 4) pelaksana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 6) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Anggaran terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja

Langsung dan Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah.

- 1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam urusan Penyusunan anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; pelaksana Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam bidang Anggaran urusan Penyusunan anggaran Belanja Langsung. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; pelaksana Pengelolaan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam bidang urusan dokumentasi anggaran dan pengelolaan belanja hibah, subsidi, bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Fungsinya adalah : perencana dan pelaksana Renja Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah; pelaksana Pengelolaan Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah; pelaksana dan

pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

a. Tugas

Membantu Kepala BKD dalam urusan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.

b. Fungsi

- 1) pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 2) pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 3) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 4) pelaksana Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah APBD;
- 5) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 6) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Belanja Langsung, Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.

- 1) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam bidang urusan Belanja Langsung. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Belanja Langsung; pelaksana Pengelolaan Belanja Langsung APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas –

tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam bidang urusan Belanja Tidak Langsung. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Belanja Tidak Langsung; pelaksana Pengelolaan Belanja Tidak Langsung APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam bidang urusan Pengelolaan Kas Daerah. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; pelaksana Pengelolaan Kas Daerah APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Tugas

Membantu Kepala Badan dalam bidang akuntansi dan pelaporan pelaksanaan APBD.

b. Fungsi

- 1) pengkoordinasian antar Subbidang dalam Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- 2) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- 3) pelaksana Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan APBD;
- 4) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan

- 5) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran, Subbidang Akuntansi Pelaporan dan Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan

- 1) Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam bidang urusan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; pelaksana Pengelolaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam bidang Akuntansi dan Pelaporan. Fungsinya adalah pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Akuntansi Pelaporan; perencana Renja Subbidang Akuntansi Pelaporan; pelaksana renja bidang tugasnya; pelaksana Pengelolaan Akuntansi Pelaporan realisasi APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam bidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan; pelaksana Pengelolaan Analisis dan Evaluasi Pelaporan realisasi APBD; pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP)

dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; danpelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Bidang Aset

a. Tugas

Kepala BKD dalam bidang urusan perencanaan kebutuhanBMD, pemanfaatan dan pemberdayaan BMD seta penatausahaan BMD.

b. Fungsi

- 1) pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Aset;
- 2) perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Aset;
- 3) pelaksana Pengelolaan Aset daerah;
- 4) perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 5) pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Aset terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD, Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD dan Subbidang Penatausahaan BMD.

- 1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam urusan Perencanaan Kebutuhan BMD. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD;pelaksana Pengelolaan Perencanaan Kebutuhan BMD;pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; danpelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam urusan Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD;pelaksana

Pengelolaan Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD;pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; danpelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Subbidang Penatausahaan BMD Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam urusan Penatausahaan BMD. Fungsinya adalah perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penatausahaan BMD;pelaksana Pengelolaan Penatausahaan BMD;pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; danpelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya BKD

2.2.1.Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BKD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Oktober 2018, tercatat sebanyak 64 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BKD Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BKD Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)						TOTAL (Orang)
		SLTP	SLTA	D-1	D-3	S-1	S-2	
1	Sekretariat	1	2	-	1	5	1	10
2	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	5	-	1	2	2	10
3	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	-	3	2	-	4	1	9
4	Bidang Anggaran	-	-	-	2	4	2	8
5	Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah	-	3	-	-	3	1	7
6	Bidang Akuntansi & Pelaporan	-	-	-	2	2	2	6
7	Bidang Aset	-	3	-	-	7	1	11
	Jumlah (Orang)	1	16	2	6	27	10	62
	Persentase (%)	1,6	25,8	3,2	9,7	43,5	16,1	100

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan SLTA dan S1.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BKD Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai BKD Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin
(November Tahun 2018)

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	6	4	10
2	Bidang Pendataan dan Penetapan	8	2	10
3	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	7	2	9
4	Bidang Anggaran	4	4	8
5	Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah	2	5	7
6	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	0	6	6
7	Bidang Aset	6	5	11
Total (Orang)		36	28	62
Persentase (%)		56,25	43,75	100

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Bidang Akuntansi.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BKD Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (70,31 %). Secara lengkap komposisi pegawai BKD Kota Pekalongan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BKD Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	6	2	10
2	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	3	7	-	10
3	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	-	2	7	-	9
4	Bidang Anggaran	-	1	5	2	8
5	Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah	-	-	7	-	7
6	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	1	4	1	6
7	Bidang Aset	-	2	9	-	11
Jumlah (Orang)		0	13	45	5	64
Persentase (%)		0	20,3	70,3	9,4	100

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BKD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana BKD Kota Pekalongan
Tahun 2018

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Stationary Generating Set	1
2	Pompa Lain-lain	1
3	Sedan	1
4	Staion Wagon	13
5	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	3
6	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1
7	Pick Up	1
8	Sepeda Motor	68

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
9	Gerobak Tarik	5
10	Gerobak Lori	1
11	Mesin Bor	1
12	Rol Meter	3
13	Global Positioning System	1
14	DCP (Alat Control) Sensor	2
15	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	1
16	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	3
17	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2
18	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	4
19	Mesin Hitung Elektronik	2
20	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1
21	Mesin Plate Folio	1
22	Lemari Besi	13
23	Rak Besi/Metal	3
24	Rak Kayu	5
25	Filling Besi/Metal	29
26	Lemari Sorok	2
27	Lemari Kaca	21
28	Lemari Makan	1
29	Lemari kayu	18
30	Alat Penghancur Kertas	3
31	Papan Nama Instansi	55
32	Papan Pengumuman	5
33	White Board	7
34	Peta	2
35	Peta	2
36	Mesin Absensi	1
37	Alat Pemotong Kertas	1
38	Perforator Besar	1
39	Overhead Projektor	1
40	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	38
41	Lemari Kayu	18
42	Meja Besi/Metal	1
43	Meja Kayu/Rotan	5
44	Kursi Besi/Metal	8
45	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	5
46	Zice	4
47	Meja Rapat	9
48	Meja Tulis	32
49	Meja Makan	1
50	Meja Telpon	2
51	Meja Podium	1
52	Meja Panjang	3
53	Kursi Rapat	66

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
54	Kursi Tamu	1
55	Kursi Tangan	2
56	Kursi Putar	14
57	Kursi Biasa	6
58	Kursi Lipat	20
59	Kursi Lipat	20
60	Meja Komputer	38
61	Sofa	1
62	Jam Mekanis	1
63	Mesin Potong Rumput	3
64	Alat Pembersih Lain-lain	3
65	Lemari Es	5
66	AC Unit	8
67	AC Split	27
68	Kipas Angin	5
69	Exhaust Fan	1
70	Kompor Gas	2
71	Kitchen Set	3
72	Tabung Gas	4
73	Televisi	5
74	Cassette Recorder	1
75	Amplifier	1
76	Loudspeaker	5
77	Sound System	7
78	Wireless	1
79	Megaphone	1
80	Microphone Table Stand	1
81	Camera Video	2
82	Camera Film	2
83	Tangga Aluminium	2
84	Dispenser	8
85	Mimbar/Podium	1
86	Handy Cam	1
87	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6
88	Gordyn	16
89	Alat Pemadam Portable	2
90	Local Area Network (LAN)	1
91	P.C Unit	46
92	Lap Top	31
93	Note Book	18
94	Plotter	1
95	Hard Disk	18
96	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
97	Printer	68
98	Scanner	18

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
99	Printer	68
100	Scanner	18
101	External	1
102	Server	5
103	Router	1
104	Modem	1
105	Peralatan Jaringan Lain-lain	3
106	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
107	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11
108	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	25
109	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
110	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1
111	Meja Tamu Ruangan Biasa	1
112	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
113	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12
114	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	27
115	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1
116	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1
117	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3
118	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	5
119	Proyektor + Attachment	5
120	Telephone Hybird	2
121	Microphone/Wireless Mic	6
122	Unintemuptible Power Supply (UPS)	13
123	Camera Electronic	1
124	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1
125	Slide Projector	1
126	Mesin Cetak Offset Roll	2
127	Mesin Cetak Offset Mini	1
128	Amplifier	1
129	Microphone	1
130	Loudspeaker	5
131	Sound System	7
132	Telephone (PABX)	1
133	Intermediate Telephone/Key Telephone	1
134	Pesawat Telephone	20
135	Telephone Mobile	2
136	Wireless Amplifier	1
137	Receiver STL/VHF (FM)	1
138	Receiver STL/UHF	2
139	Tabung Oksigen	1

2.3 Kinerja Pelayanan BKD

Sebagaimana tugas pokok BKD sebagai koordinator pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah, maka kinerja selama 5 tahun terakhir (2010-2015) pada BKD Kota Pekalongan sebagai berikut :

a. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (Realisasi)

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Kontribusi
2010	47.495.707.337	417.191.612.087	11,38
2011	63.414.318.840	509.929.023.924	12,44
2012	91.205.786.310	614.166.700.431	14,85
2013	114.252.438.719	675.375.467.702	16,92
2014	144.065.424.017	762.110.364.355	18,90
2015	152.044.596.332	809.733.612.473	18,78

b. Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	42.395.561.052	47.495.707.337	112,03
2011	56.990.829.790	63.414.318.840	111,27
2012	68.845.149.000	91.205.786.310	132,48
2013	93.855.722.000	114.252.438.719	121,73
2014	115.235.462.000	144.065.424.017	125,02
2015	155.549.952.000	152.044.596.332	97,75

c. Peningkatan PAD

Tahun	Realisasi	Naik/Turun
2010	47.495.707.337	
2011	63.414.318.840	33,52
2012	91.205.786.310	43,83
2013	114.252.438.719	25,27
2014	144.065.424.017	26,09
2015	152.044.596.332	5,54

d. Peningkatan Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi	Naik/Turun
2010	417.191.612.087	
2011	509.929.023.924	22,23
2012	614.166.700.431	20,44
2013	675.375.467.702	9,97
2014	762.110.364.355	12,84
2015	809.733.612.473	6,25

e. Ketepatan waktu penyusunan Perda APBD dan Perda Laporan Pertanggungjawaban APBD

Tahun	Perda APBD	Perda Laporan Pertanggungjawaban APBD
2010	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2011	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2012	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2013	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2014	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2015	Tepat Waktu	Tepat Waktu

f. Opini BPK terhadap LKD

Tahun	Opini BPK
2010	Wajar Dengan Pengecualian
2011	Wajar Dengan Pengecualian
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Dengan Pengecualian
2015	Wajar Dengan Pengecualian

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan BKD Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rentra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Realisasi Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah				10%	10%	10%	10%	10%	12,44%	14,85%	16,92%	18,90%	18,78%	124%	149%	169%	189%	188%
2	Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD				100%	100%	100%	100%	100%	111,27%	132,48%	121,73%	125,02%	97,75%	111,27%	132,48%	121,73%	125,02%	97,75%
3	Peningkatan PAD				25%	25%	25%	25%	25%	33,52%	43,83%	25,27%	26,09%	5,54%	134,08%	175,32%	101,08%	104,36%	22,16%
4	Ketepatan waktu penyusunan Perda APBD dan Perda Laporan Pertanggungjawaban APBD				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
5	Opini BPK terhadap LKD				WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2010 - 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Ratio Antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	12.744.274.153	19.957.475.800	18.665.569.000	17.996.315.000	18.625.834.000	11.904.132.932	16.878.909.626	16.775.676.713	16.928.554.182	17.102.992.626	93,41%	84,57%	89,87%	94,07%	91,82%	1.176.311.969	1.039.771.939
Belanja Tidak Langsung	5.979.846.653	6.427.435.000	6.677.206.000	6.415.717.000	7.309.934.000	5.631.683.037	5.426.103.940	5.988.087.171	6.159.886.554	7.023.828.836	94,18%	84,42%	89,68%	96,01%	96,09%	266.017.469	278.429.160
Belanja Pegawai	5.979.846.653	6.427.435.000	6.677.206.000	6.415.717.000	7.309.934.000	5.631.683.037	5.426.103.940	5.988.087.171	6.159.886.554	7.023.828.836	94,18%	84,42%	89,68%	96,01%	96,09%	266.017.469	278.429.160
Belanja Langsung	6.764.427.500	13.530.040.800	11.988.363.000	11.580.598.000	11.315.900.000	6.272.449.895	11.452.805.686	10.787.589.542	10.768.667.628	10.079.163.790	92,73%	84,65%	89,98%	92,99%	89,07%	910.294.500	761.342.779
Belanja Pegawai	1.673.163.000	1.696.299.000	2.429.932.500	1.836.086.000	1.987.074.000	1.540.880.000	1.490.795.750	2.330.933.000	1.770.885.000	1.863.291.190	92,09%	87,89%	95,93%	96,45%	93,77%	62.782.200	64.482.238
Belanja Barang dan Jasa	4.490.254.500	3.408.596.800	4.341.280.500	4.832.659.000	6.082.576.000	4.139.165.895	2.868.229.906	3.820.745.142	4.323.413.728	5.173.337.600	92,18%	84,15%	88,01%	89,46%	85,05%	318.464.300	206.834.341
Belanja Modal	601.010.000	8.425.145.000	5.217.150.000	4.911.853.000	3.246.250.000	592.404.000	7.093.780.030	4.635.911.400	4.674.368.900	3.042.535.000	98,57%	84,20%	88,86%	95,17%	93,72%	529.048.000	490.026.200

Sumber : BKD Kota Pekalongan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan BKD

Tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah, antara lain :

1. Semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur BKD Kota Pekalongan dituntut untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan, baik itu aparatur pemungut pajak maupun aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami peran pentingnya pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dituntut sumber daya aparatur BKD Kota Pekalongan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, manfaat dari Pajak Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pajak Daerah;
3. Peningkatan Pendapatan Daerah setiap tahunnya sesuai dengan potensi yang ada.
4. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.

Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain :

1. Peningkatan SDM melalui Bintek/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah;
2. Sosialisasi tentang pajak daerah diarahkan langsung kepada masyarakat (WP), tidak hanya melalui aparat kelurahan atau tokoh masyarakat saja sehingga potensi penerimaan pajak daerah di harapkan dapat meningkat;
3. Pengalihan PBB-P2 pada Tahun 2013 menjadi pajak daerah, yang merupakan potensi dan peluang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah, antara lain :

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Optimalisasi kinerja perangkat daerah;
3. Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan;
4. Optimalisasi belanja pemerintah daerah sebagai stimulus fiskal;
5. Optimalisasi potensi pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah;
6. Optimalisasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah;
7. Komitmen yang kuat dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Pemenuhan kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pengelolaan keuangan daerah;
9. Perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi
10. Perlunya koordinasi yang intensif guna optimalisasi dana perimbangan;
11. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
12. Pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
13. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang teknologi informasi dan akuntansi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil

Walikota

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”**. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan

akuntabel berbasis teknologi informasi.

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga dalam menjalankan tugas pokok fungsinya selalu mendasari dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang digariskan oleh kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penerbitan izin antara lain adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 Dimana dengan adanya Peraturan Daerah tentang RT/RW tersebut tentu membawa dampak terhadap proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu faktor-faktor yang menghambat maupun faktor-faktor yang mendorongnya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis BKD Kota Pekalongan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan BKD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;

3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan.
6. Penatausahaan asset daerah secara tertib.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BKD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BKD Kota Pekalongan adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BKD Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi BKD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah.

Tabel : 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kemandirian Daerah (Kontribusi PAD terhadap Pendapatan)	21%	21%	22%	21%	21%	22%
			% Peningkatan PAD	17,47%	7,20%	4,32%	10%	10%	10%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat						
			1. Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1. CC 2. -	1. BB 2. 286	1. BB 2. 400	1. BB 2. 450	1. BB 2. 475	1. BB 2. 500

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan.

Strategi dan kebijakan BKD Kota Pekalongan dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel : 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas				
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	<p>Peningkatan pengetahuan terkait perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah untuk para sumber daya aparatur.</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Persediaan</p>
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	<p>Peningkatan koordinasi yang intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>	<p>Peningkatan koordinasi yang intensif dengan pihak terkait</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah</p> <p>Penerapan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online</p>
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi kinerja organisasi	<p>Peningkatan dukungan administrasi perkantoran</p> <p>Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras aparatur</p> <p>Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan</p> <p>Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan</p> <p>Peningkatan disiplin aparatur perangkat daerah</p> <p>Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 terdiri dari 6 (enam) program, dan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun program program yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran table 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketersediaan Dokumen APBD yang tepat waktu		6 Dokumen	2.647.040.000	6 Dokumen	3.386.699.750	6 Dokumen	3.565.000.000								KOTA PEKALONGAN	
				Persentase Perangkat Daerah termonitor dalam Pelaporan keuangan		100%			100%		100%									
				Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi asset dan keuangan setiap semester		100%			100%		100%									
			Penyusunan analisa standar belanja						180.642.400											
			Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun		2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	92.370.000	2 dokumen	100.000.000									
			Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun		1 sisdur	50.000.000	1 sisdur	55.308.300	1 sisdur	65.000.000									
			Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	1. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD 2. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD		2	237.500.000	2	287.276.310	1. 100 buku 2. 2 dokumen	300.000.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun		2	167.500.000	2	229.597.735	1. 2 Dokumen 2. 100 buku	240.000.000							
			Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah		200 orang	50.000.000	200 orang	48.701.680	300 orang	50.000.000							
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah	1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 2. Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 3. Jumlah laporan / data pengelolaan barang milik daerah 4. Jumlah pelaksanaan sensus BMD		62	590.240.000	31	660.083.500	1. 27 OPD 2. 36 Unit Kerja 3. 67 laporan 4. 1 kali	640.000.000							

Pekalongan
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus		3	130.000.000	3	56.496.000	3 jenis	100.000.000								
			Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable		1 bulan	200.000.000	1 bulan	391.982.750	12 bulan	120.000.000								
			Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial		12 bulan	55.000.000	12 bulan	108.951.220	12 bulan	160.000.000								
			Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ OPD/unit kerja yang diverifikasi dan dicetak		63	200.000.000	31	211.989.000	67 PD/unit kerja	234.000.000								
			Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah		2	45.000.000	2	45.150.000	2 buku	50.000.000								
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah		12	85.000.000	12	81.740.700	12 bulan	75.000.000								

Pekalongan
 Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Publikasi/ sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah		2 kali	110.000.000	2 kali	107.993.585	2 kali	105.000.000								
			Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah asistensi RKA OPD/Unit kerja yang dilaksanakan		2	175.000.000	2	171.658.700	67 PD/unit kerja	175.000.000								
			Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potongan PPh 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan masa tahunan PPh 21 gaji PNS pemerintah kota pekalongan		4000 data	25.000.000	4000 data	13.863.400	3200 data	20.000.000								
			Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran		12	50.000.000	12	47.304.600	1. 12 bulan 2. 6 kali	50.000.000								

Pekalongan
 Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyusunan Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun		2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	343.712.110	2 dokumen	350.000.000								
			Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR				12 bulan	55.529.700	12 bulan	41.000.000								
			Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	1. Jumlah sertifikat tanah 2. Jumlah papan nama aset 3. Jumlah Patok Batas Tanah 4. Jumlah inventarisasi milik pemerintah kota pekalongan		1. 40	1.800.000	1. 40	176.348.060	1. 40 bidang, 2. 55 buah 3. 600 buah 4. 900 bidang	315.000.000								
			Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah entri bukti potongan PPh 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS pemerintah kota pekalongan		4000 data	25.000.000	4000 data	20.000.000	4000 data	70.000.000								
			Fasilitasi pelaporan DAK	1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan						1. 6 bulan 2. 4 triwulan	65.000.000								

Pekalongan
 Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	1. Buku Analisa Laporan Keuangan 5 tahun yang disusun 2. Buku perkembangan APBD 5 tahun yang disusun						1. 1 buku 2. 1 buku	65.000.000							
			Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	1. Laporan LO dan LRA OPD 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan 3. Laporan Keuangan konsolidasi semesteran						1.69 laporan 2. 14 laporan 3. 2 buku	75.000.000							
			Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah bulan pendampingan transaksi non tunai						12 bulan	100.000.000							
			Prog. Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	1. Ketersediaan Dokumen APBD Tepat Waktu	100%							100%		100%		100%		100%
				2. persentase penyaluran hibah dan bansos	100%								100%		100%		100%	
			Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	1. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD 2. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD								1. 100 buku; 2. 2 dokumen;	358.000.000	1. 100 buku; 2. 2 dokumen;	358.000.000	1. 100 buku; 2. 2 dokumen;	300.000.000	

Pekalongan
 Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun								1. 2 dokumen; 2. 100 buku	240.000.000	1. 2 dokumen; 2. 100 buku	240.000.000	1. 2 dokumen; 2. 100 buku	240.000.000	
			Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial								12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	
			Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Publikasi/ sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah								2 kali	105.000.000	2 kali	105.000.000	2 kali	105.000.000	
			Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah asistensi RKA OPD/Unit kerja yang dilaksanakan								66	175.000.000	66	175.000.000	66	175.000.000	
			Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran								1. 12 bulan 2. 6 kali	50.000.000	1. 12 bulan 2. 6 kali	50.000.000	1. 12 bulan 2. 6 kali	50.000.000	

Pekalongan
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Program Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	1. Persentase Penerbitan SP2D atas Pengajuan SPM dari OPD 2. Persentase Pencairan SP2D atas Penerbitan SP2D								1. 100% 2. 100%	65.000.000	1. 100% 2. 100%	65.000.000	1. 100% 2. 100%	65.000.000	1. 100% 2. 100%	
			Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun								1 Sisdur	75.000.000	1 Sisdur	75.000.000	1 Sisdur	75.000.000		
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah								12 Bulan	41.000.000	12 Bulan	41.000.000	12 Bulan	41.000.000		
			Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR								12 Bulan	56.650.000	12 Bulan	56.650.000	12 Bulan	56.650.000		
			Fasilitasi pelaporan DAK	1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan								1. 12 Bulan 2. 4 Laporan	50.000.000	1. 12 Bulan 2. 4 Laporan	50.000.000	1. 12 Bulan 2. 4 Laporan	50.000.000		
			Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan yang mengikuti sosialisasi								300 orang	20.000.000	300 orang	20.000.000	300 orang	20.000.000		
			Penyusunan dan Pelaporan SFT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potongan PPh 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan masa tahunan PPh 21 gaji PNS pemerintah kota pekalongan								3200	70.000.000	3200	70.000.000	3200	70.000.000		

Pekalongan
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Dana Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya								3200 PNS	234.000.000	3200 PNS	234.000.000	3200 PNS	234.000.000		
			Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah OPD(Unit Kerja) yang diverifikasi dokumen SPJnya								67 PD/Unit Kerja	100.000.000	67 PD/Unit Kerja	100.000.000	67 PD/Unit Kerja	100.000.000		
			Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah bulan pendampingan transaksi non tunai								12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
			Prog. Pengelolaan Akuntansi & Pelaporan	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan sesuai SAP	100%							100%		100%		100%		100%	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun								14 Laporan	100.000.000	14 Laporan	100.000.000	14 Laporan	100.000.000		
			Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	1. Buku Analisa Laporan Keuangan 5 tahun yang disusun 2. Buku perkembangan APBD 5 tahun yang disusun								1. 1 Buku 2. 1 Buku	65.000.000	1. 1 Buku 2. 1 Buku	65.000.000	1. 1 Buku 2. 1 Buku	65.000.000		
			Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable								12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000		
			Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	1. Laporan LO dan LRA OPD 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan 3. Laporan Keuangan konsolidasi semesteran								1. 69 Lap 2. 14 Lap 3. 2 Buku	75.000.000	1. 69 Lap 2. 14 Lap 3. 2 Buku	75.000.000	1. 69 Lap 2. 14 Lap 3. 2 Buku	75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyusunan Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun								2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	
			Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	1. Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot								61,50 %		63,00%		64,50%		
				2. Persentase OPD yang menyelesaikan laporan aset tetap									100%		100%		100%	
				3. Persentase OPD yang menyelesaikan laporan persediaan									100%		100%		100%	
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan									-		-	5 unit	2.420.000.000	
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan								52	1.055.556.000		-		-	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terhabilitasi secara rutin/berkala								1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	
			Rehabilitasi sedang/berat mobil aset lainnya	Jumlah mobil aset lainnya yang direhabilitasi								1 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	
			Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun								2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	
			Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun								2 Buku	50.000.000	2 Buku	50.000.000	2 Buku	50.000.000	

Perubahan
 Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terhabilitasi secara rutin/berkala								3 unit	75.000.000	3 unit	75.000.000	3 unit	75.000.000	
			Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	1. Jumlah berkas pengajuan sertifikat tanah 2. Jumlah papan nama aset 3. Jumlah Patok Batas Tanah 4. Jumlah inventarisasi milik pemerintah kota pekalongan								1. 40 bidang; 2. 55 buah; 3. 600 buah; 4. 900 bidang	315.000.000	1. 40 bidang; 2. 55 buah; 3. 600 buah; 4. 900 bidang	315.000.000	1. 40 bidang; 2. 55 buah; 3. 600 buah; 4. 900 bidang	315.000.000	
			Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok								5 kali	70.000.000	5 kali	70.000.000	5 kali	80.000.000	
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah	1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 2. Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 3. Jumlah laporan / data pengelolaan barang milik daerah 4. Jumlah pelaksanaan sensus BMD								1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan; 4. 1 kali	620.000.000	1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan; 4. 1 kali	620.000.000	1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan; 4. 1 kali	640.000.000	
			Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus								3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	100.000.000	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Pendapatan		160,04	1.456.710.000	17,56	2.523.143.000	192,7M	3.067.900.000	4,00%		4,00%		4,50%		

Pekalongan
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok			1	61.977.000	5 kali	80.000.000									
			Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun 2. Jumlah Dokumen perencanaan pendapatan daerah 3. Jumlah Pelaksanaan rakorbid pendapatan			1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali	90.000.000	1. 12 laporan; 2. 2 dokumen ; 3. 6 kali	95.939.000	1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali	133.000.000	1. 12 Laporan 2. 2 Dokumen 3. 6 kali	133.000.000	1. 12 Laporan 2. 2 Dokumen 3. 6 kali	133.000.000	1. 12 Laporan 2. 2 Dokumen 3. 6 kali	133.000.000	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-pendapatan daerah	Jumlah WP/WR yang terlayani			100	145.000.000	100	192.705.000	50 wajib pajak	290.000.000	2500 WP/WR	290.000.000	2500 WP/WR	290.000.000	2500 WP/WR	290.000.000	
			Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT/SKPD/SKRD yang diterbitkan			500	81.000.000	500	104.690.000	89000 lembar	80.000.000	89000 lembar	80.000.000	89000 lembar	80.000.000	89000 lembar	80.000.000	
			Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan			83000	257.000.000	83000	247.740.000	86500 lembar	310.000.000	88000	310.000.000	88000	310.000.000	88000	310.000.000	
			Pemutakhiran data PBB	1. Jumlah data objek pajak yang diupdate 2. Jumlah peta objek PBB P2 yang divalidasi dan diupdate 3. Jumlah permohonan pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan			27	310.000.000	27	637.260.000	1. 27500 data; 2. 13 peta 3. 1000 berkas	850.000.000	1. 27500 data 2. 13 Peta 3. 1000 berkas	950.000.000	1. 27500 data 2. 13 Peta 3. 1000 berkas	950.000.000	1. 27500 data 2. 13 Peta 3. 1000 berkas	850.000.000	
			Pengembangan SIM pendapatan daerah	1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang dikembangkan 2. Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke bank yang dikembangkan					94.380.000	1. 2 buah; 2. 1 buah	150.900.000	1. 2 Aplikasi 2. 1 Aplikasi	150.000.000	1. 2 Aplikasi 2. 1 Aplikasi	150.000.000	1. 2 Aplikasi 2. 1 Aplikasi	150.900.000		

Perubahan
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

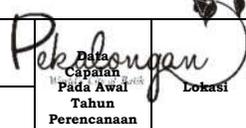
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang didata				46.272.000	2500 objek	150.000.000	2500 objek pajak	60.000.000	2500 objek pajak	60.000.000	2500 objek pajak	150.000.000		
			Penagihan pajak dan retribusi daerah	Prosentase WP/WR yang tertagih		300 WP/WR	79.000.000	300 WP/WR	475.058.000	50%	230.000.000							
			Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi		200	127.710.000	200	135.105.000	300 WP/WR	246.000.000							
			Gebyar pajak daerah	Jumlah WP yang menerima penghargaan		1	180.000.000		44.800.000		133.000.000							
			Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi					98.357.000	2000 peralihan	85.000.000							
			Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah		12	187.000.000	12	180.705.000	12 bulan	270.000.000							
			Pemeriksaan pajak daerah	Jumlah WP/WR yang diperiksa					108.155.000	50 WP/WR	60.000.000							
			Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	1.persentase Pencapaian target pendapatan Pajak								100%		100%		100%		
				2. persentase Pencapaian target pendapatan Retribusi									100%		100%		100%	
			Penagihan pajak dan retribusi daerah	Persentase WP/WR yang tertagih								54%	230.000.000	57%	230.000.000	60%	230.000.000	
			Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi								300 WP/WR	246.000.000	300 WP/WR	246.000.000	300 WP/WR	246.000.000	
			Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah								12 bulan	210.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	270.000.000	

Pekalongan
 Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi								2000 peralihan	85.000.000	2000 peralihan	85.000.000	2000 peralihan	85.000.000	
			Pemeriksaan pajak daerah	Jumlah WP/WR yang diperiksa								50 WP	145.000.000	50 WP	145.000.000	50 WP	60.000.000	
			Gebyar Pajak Daerah	Jumlah WP/WR yang menerima penghargaan								15 WP	78.000.000	15 WP	78.000.000	15 WP	133.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, Cetak, Penggandaan dan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%		100%		100%		100%
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan pelaksanaan surat menyurat		12 bulan	6.300.000	12 bulan	1.718.480	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	612.520.000	12 bulan	600.827.487	12 bulan	513.000.000	12 bulan	514.200.000	12 bulan	529.626.000	12 bulan	556.107.300	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan		12 bulan	91.700.000	12 bulan	99.200.000	12 bulan	103.000.000	12 bulan	103.000.000	12 bulan	103.000.000	12 bulan	103.000.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bulan	162.600.000	12 bulan	168.000.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	105.000.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos		12 bulan	140.000.000	12 bulan	189.991.650	12 bulan	210.000.000	12 bulan	190.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	210.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	150.000.000	12 bulan	82.050.000	12 bulan	82.300.000	12 bulan	82.300.000	12 bulan	82.300.000	12 bulan	82.300.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	10.000.000	12 bulan	14.563.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	

Perubahan
 Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga		12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.608.200	12 bulan	13.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	13.000.000	12 bulan	13.000.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.010.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	134.992.000	12 bulan	134.949.200	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah		12 bulan		12 bulan	967.708.440	250 orang/kali	650.000.000	250 org/kali	640.000.000	250 org/kali	650.000.000	250 org/kali	650.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan		12 bulan		12 bulan	200.460.000	12 bulan	170.000.000	12 bulan	175.000.000	12 bulan	170.000.000	12 bulan	170.000.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100%	12 bulan	2.619.000.000	12 bulan	6.075.019.905	12 bulan	2.510.500.000	100%		100%		100%	100%	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		1 unit	137.000.000	1 unit	58.899.008	1 unit	300.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala		45 unit	175.000.000	49 unit	118.973.959	49 unit	151.000.000	49 unit	150.000.000	49 unit	151.000.000	49 unit	151.000.000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang/berat		1 unit	650.000.000	1 unit	205.616.900	1 unit	385.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	385.000.000	1 unit	385.000.000	



 Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		100 unit	265.000.000	30 unit	507.710.638	29 unit	135.000.000	29 unit	135.000.000	15 unit	135.000.000	20 unit	135.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor		12 bulan	50.000.000	12 bulan	92.916.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun				1 gedung	192.510.400									
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan 2. Jumlah Bus yang diadakan		4 unit	1.042.000.000		4.240.522.000	5 unit; 1 unit	1.125.000.000							
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan		14 unit	300.000.000		461.991.000	20 unit	364.500.000							
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas						195.880.000									
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100%	75.000.000	100%	#####	100%	#####	100%		100%		100%		
			Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun		13 dokumen	10.000.000	14 dokumen	7.150.650	14 dokumen	10.000.000	14 dokumen	10.000.000	14 dokumen	10.000.000	14 dokumen	10.000.000	
			Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun		6 Dokumen	10.000.000	6 dokumen	8.653.300	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	10.000.000	
			Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun						1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	

Pekalongan
 Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Tahun ke 6		Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyusunan Rentra	Jumlah Dokumen Yang disusun				-		1 dokumen	10.000.000								
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun		4 kali	55.000.000	4	110.540.000	14 laporan	100.000.000								
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Pengaduan yang diterima	0	0%	33.752.000	0%	34.766.460	0%	46.007.000	0		0		0			
			Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota		1 orang	20.752.000	1 orang	23.466.460	1 orang	26.007.000	1 orang	29.907.000	1 orang	31.402.350	1 orang	32.972.468		
			Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran hakteknas, karnaval batik, dan keterbukaan informasi publik		3 kegiatan	13.000.000	3 kegiatan	11.300.000	3 kegiatan	20.000.000	3 kegiatan	20.000.000	3 kegiatan	20.000.000	3 kegiatan	20.000.000		

Pekalongan
 Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BKD Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BKD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Penunjang Urusan Pemerintahan : Urusan Keuangan									
1	Opini BPK atas LKD	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	5,29%	5,29%	9,70%	9,76%	9,87%	9,96%	10%	10%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan revisi dari perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan digunakan sebagai panduan bagi para pengelola Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan pedoman/panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan di masa-masa mendatang.

Ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan memuat arah kebijakan dan rencana program serta kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Oleh karena sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan/ anggaran yang tersedia.

Pekalongan, November 2018

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan



Drs. SUCIONO

Pembina Tk. I

NIP. 19610316 199303 1 004